

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 adalah suatu peristiwa yang menyebar ke seluruh dunia dalam bentuk virus. Disebabkan oleh virus corona jenis baru yang disebut SARS-Co-2. Wabah ini pertama kali terdeteksi di Wuhan, China pada tahun 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Virus ini terus menyebar secara global, dengan hampir 35 juta kasus terkonfirmasi di 188 negara/wilayah, dan lebih dari 1 juta kematian. Covid-19 dengan cepat menyebar ke seluruh dunia dan berdampak besar ke seluruh dunia. Kasus positif Covid-19 terdeteksi di Indonesia pada tahun 2020 yang berdampak pada berbagai sektor industri, salah satunya adalah industri pariwisata dan kuliner. Pemerintah pusat melalui kebijakan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 telah menetapkan Covid-19 sebagai bencana non-alam nasional.

Pandemi Covid-19 semakin mengancam perekonomian Indonesia (termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)) yang berdampak sangat signifikan terhadap berbagai tatanan kehidupan manusia saat ini. Larangan dan pembatasan sosial digunakan sebagai slogan untuk bersama-sama mengingatkan bahwa pandemi memiliki penyebaran skala yang sangat besar. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), dampak Covid-19 cukup dalam, mencapai minus 5,32%. Krisis terakhir terjadi pada tahun 1998 dan 2008. Data terakhir menunjukkan bahwa 98% perusahaan di sektor mikro, atau sekitar 68 juta orang, terkena dampaknya. Dampak dari pandemi Covid-19 adalah akibat dari penurunan permintaan masyarakat yang disebabkan oleh perlambatan ekonomi dan pembatasan sosial.

Adanya pandemi Covid-19 berdampak signifikan bagi sektor UMKM, mulai dari penurunan omzet, gangguan arus kas dan kredit bermasalah sampai dengan peningkatan PHK pekerja (Fitriani et al., 2021). UMKM adalah sektor usaha yang mengalami keterpurukan, yang secara tidak langsung menyebabkan perlambatan pada pertumbuhan sektor ekonomi di Indonesia (Aisyah, 2020). Banyak pekerja yang menganggur, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) tidak dapat mempertahankan modal komersialnya, hal ini menjadi masalah yang menyebabkan resesi usaha kecil, menengah dan mikro karena mereka tidak dapat terus beroperasi dan dana tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sekitar 20 ribu lebih pelaku UMKM bidang pariwisata dan ekonomi kreatif Yogyakarta mengalami keterpurukan, bahkan sebagian telah gulung tikar.

UMKM merupakan bagian penting dari perekonomian dan pembangunan nasional. Mengingat sektor UMKM merupakan motor penggerak perekonomian dan pembangunan nasional, maka perlu dirumuskan strategi untuk meningkatkan kapabilitas sektor UMKM. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan serta meningkatkan kesempatan kerja. Pengembangan usaha kecil, menengah dan mikro (UMKM) merupakan salah satu prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Usaha kecil, menengah dan mikro telah memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional. Pengembangan usaha kecil, menengah dan mikro (UMKM) telah menjadi usaha yang sangat strategis, yang memiliki potensi besar dalam mendorong kegiatan ekonomi masyarakat dan juga merupakan sumber pendapatan utama bagi peningkatan kesejahteraan sebagian besar masyarakat.

Di masa pandemi Covid-19, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merumuskan berbagai langkah untuk mendorong usaha kecil, menengah, dan mikro serta koperasi tetap mempertahankan kemampuannya. Bertahan dan bangkit di tengah pandemi Covid-19. Kementerian menerapkan berbagai kebijakan melalui berbagai program yang ditujukan untuk membantu usaha kecil, menengah dan mikro untuk bertahan di dunia ekonomi.

Akibat pandemi Covid-19, berbagai permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil, menengah dan mikro perlu mendapat perhatian khusus, dimana UMKM di Indonesia merupakan jenis Usaha Mikro yang dikerjakan perseorangan yang rentan terhadap gangguan internal dan eksternal. Selain itu, Kementerian Keuangan menilai pandemi Covid-19 telah memberikan dampak negatif terhadap perekonomian domestik, seperti penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, eksistensi UMKM, ancaman terhadap perbankan dan industri keuangan, dan kinerja perusahaan (Suhery et al., 2020).

Tabel 1.1

Jumlah UMKM Berdasarkan Wilayah

Wilayah DIY	Jumlah UMKM
Kabupaten Bantul	77.332,00
Kabupaten Gunung Kidul	53.859,00
Kabupaten Kulon Progo	35.918,00
Kabupaten Sleman	84.994,00
Kota Yogyakarta	32.447,00
Lainnya (KTP Luar DIY usaha di DIY)	18.249,00
Total	302.799,00

Sumber : Data olahan, (2021)

Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomian DIY ditunjukkan oleh kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja. Dalam perkembangannya usaha mikro mendominasi jumlahnya setiap tahun. Pada tahun 2021 jumlah UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 302.799,00 unit UMKM. Kabupaten Sleman memiliki jumlah yang paling besar dengan 84.994,00 unit usaha mikro kecil menengah. Sebaliknya, Kota Yogyakarta memiliki jumlah

UMKM paling kecil dengan 32.447,00 unit UMKM. Meskipun demikian, Kota Yogyakarta memiliki daya tarik dimana merupakan pusat pertumbuhan yang memiliki potensi pada sektor perdagangan, pariwisata, pendidikan dll yang terletak pada kekayaan seni budaya, keragaman objek, dan kreativitas warganya dalam upaya mengangkat berbagai keunikan yang dimiliki banyak menarik minat para wisatawan untuk mengunjungi. Sehingga, banyak pelaku UMKM yang menggantungkan pendapatannya pada kunjungan wisatawan yang ada. Adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan perlambatan pada sektor ekonomi dan juga pembatasan sosial. Hal ini berdampak pada turunnya tingkat konsumsi masyarakat yang berdampak pada turunnya pendapatan pelaku usaha selama pandemi Covid-19.

Sebagai daerah yang memiliki daya tarik salah satunya berasal dari sektor pariwisata dan kuliner, Yogyakarta banyak diminati oleh wisatawan. Ketika penurunan wisatawan di masa pandemi Covid-19 menyebabkan industri pariwisata melemah, secara tidak langsung juga akan menurunkan angka pendapatan bahkan kehabisan dana karena kurangnya pembeli. Kesulitan yang dihadapi oleh usaha kecil, menengah dan mikro selama pandemi dibagi menjadi empat masalah (Suhery et al., 2020) :

1. Berkurangnya aktifitas masyarakat diluar sebagai pelaku konsumen yang mengakibatkan turunnya penjualan.
2. Tingkat penjualan yang menurun mengakibatkan kesulitan dalam perputaran modal.
3. Pada distribusi produk pada wilayah tertentu menjadi hambatan dalam menyalurkan produk akibat adanya pembatasan.
4. UMKM mengalami kesulitan karena menggantungkan ketersediaan bahan baku pada sektor industri.

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menanggulangi permasalahan UMKM dari dampak pandemi Covid-19 melalui Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM) Kota Yogyakarta mengusulkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) secara hibah tunai bagi pelaku UMKM se Kota Yogyakarta. Dimana merupakan bagian program pemulihan Ekonomi (PEN) melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang dilakukan kepada 7,8 juta penerima dengan nominal mencapai Rp. 18,7 Triliun. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi UKM RI No.2 Tahun 2020 sebagai pembaruan dari Peraturan Menteri Koperasi UKM RI No. 6 Tahun 2020, tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional pada Masa Pandemi Covid-19, melalui Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) membuka pendaftaran pengajuan Bantuan Produktif Usaha untuk Usaha Mikro (BPUM) pada tahun 2020.

Merujuk pada Peraturan Menteri Koperasi UKM No 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Tata cara penyaluran BPUM meliputi Pengusulan calon penerima oleh Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta melalui aplikasi Jogja Smart Services (JSS), dilanjutkan Pembersihan data dan validasi data calon penerima oleh Kementerian Koperasi dan UKM, Penetapan penerima oleh Kementerian Koperasi dan UKM, dan Pencairan dana langsung ke rekening penerima BPUM atau melalui bank penyalur BPUM.

Pelaku UMKM yang dapat mendaftarkan BPUM adalah warga Yogyakarta yang dibuktikan dengan KTP Yogyakarta, memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan izin usaha mikro (IUM), tidak sedang mengakses pinjaman Kredit Usaha Rakyat, bukan ASN/TNI/Polri, bukan ASN/TNI/Polri dan pegawai BUMD/BUMN serta hanya mengajukan satu pemohon

dalam satu kartu keluarga. Setiap pemohon yang akan mendapatkan BPUM ini harus sesuai NIK warga Yogyakarta, dan Kota Yogyakarta memiliki kebijakan bahwa setiap pemohon yang akan mendapatkan BPUM ini harus sesuai NIK warga Yogyakarta. Jika satu Kartu Keluarga (KK) memiliki lebih dari satu usaha (sendiri-sendiri), bantuan hanya akan diberikan pada satu KK/pemohon. (Adminwarta, 2021).

Dalam mengakses Bantuan Produktif Usaha Mikro tahun 2020 pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran dengan informasi yang bersumber dari koperasi, Kepala Dinas Seluruh Indonesia, Himbara, Kementrian/Lembaga, PNM dan Pegadaian. Setelah melakukan pendaftaran, pelaku UMKM harus menyerahkan berkas kelengkapan print out bukti pendaftaran berkas ke kelurahan setempat. Kemudian dari kelurahan akan direkap dan dikumpulkan di kemantren. Dan setiap hari Jumat berkas tersebut akan diambil dinas untuk direkap dan divalidasi. Akan tetapi, tahun 2021 Bantuan Produktif Usaha Mikro hanya diusulkan melalui satu pintu, untuk Yogyakarta sendiri hanya bisa diusulkan oleh Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Yogyakarta melalui aplikasi *Jogja Smart Service (JSS)*. Sekitar 15.736 pelaku UMKM yang mengajukan BPUM melalui dinas yang mengampu UMKM pada Pemerintah kota Yogyakarta. Setelah diverifikasi dan divalidasi yang mendapat BPUM sekitar 35 persen atau sebanyak 4.133 pelaku UMKM. Sedangkan sisanya sekitar 11.600 pelaku UMKM yang belum terverifikasi.

Jumlah ini berdasar pada usaha kecil yang telah menyelesaikan verifikasi syarat di kota Yogyakarta. Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Yogyakarta hanya sebatas mengusulkan kepada pemerintah pusat melalui pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga tidak dapat memastikan apakah seluruh usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang diusulkan tersebut akan terverifikasi atau tidak. Selanjutnya, seluruh keputusan ditetapkan oleh pusat. (Rusqiyati, 2020). Berdasarkan informasi yang terdapat dalam (Fitriyani, 2020) bahwa Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) hanya diberikan kepada pelaku UMKM yang belum

pernah mendapatkan atau menerima bantuan peminjaman atau sejenisnya dari pihak perbankan (*unbankable*). Serta bukan sebagai aparatur ASN, TNI, BUMN dan BUMD.

Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Yogyakarta bersama perwakilan dari kementerian terkait melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerima bantuan serta memastikan pelaku usaha mikro kecil di Kota Yogyakarta memanfaatkan bantuan tersebut untuk menguatkan modal dan tidak menggunakan bantuan ini untuk kebutuhan konsumsi pribadi,. Usaha mikro kecil yang dipantau diantaranya pelaku Ecoprint dan Bakpia. Rata-rata pelaku usaha memanfaatkan bantuan tersebut untuk menguatkan modal, akan tetapi beberapa pelaku usaha mikro kecil merasa jika nilai bantuan modal yang diberikan cukup kecil serta mengeluh akibat kesulitan dalam mengakses pendaftaran bantuan tersebut. Adanya pandemi covid-19 ini diharapkan pemerintah mampu mendorong UMKM dan lebih di perhatikan lagi karena UMKM menopang kekuatan ekonomi masyarakat.

Program Bantuan Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) adalah salah satu jenis BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang diberikan oleh pemerintah. Dengan target para pengusaha mikro, kecil dan menengah, bantuan dengan total Rp 1,2 juta ini ditujukan pada mereka yang memenuhi syarat dan terdaftar sebagai penerima bantuan. Tujuan program BPUM adalah untuk mengembalikan kembali gairah perekonomian para pelaku UMKM. Ada dua skema, dimana pelaku UMKM mikro akan mendapatkan bantuan berupa bantuan modal dan pelaku UMKM yang levelnya lebih tinggi akan mendapatkan akses kredit di Bank.

Pemberian Bantuan Productif Usaha Mikro (BPUM) ini memberikan dampak yang baik dalam pendataan pelaku usaha di Kota Yogyakarta, dimana memberikan kesadaran kepada para pelaku usaha mikro untuk mendaftarkan usahanya dengan mengurus izin usaha mikro (IUM). Dalam mengajukan permohonan bantuan produktif IUM menjadi salah satu syarat yang harus dimiliki. Tetapi, Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tidak tau persis apakah banyak pelaku usaha baru yang muncul karena tergiur bantuan atau memang

pelaku usaha sudah berjalan tetapi baru mengurus izin usaha mikro (IUM) saat ada bantuan produktif usaha mikro (BPUM).

Berdasarkan latar belakang diatas, fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah tujuan dari program Bantuan Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) yang di terima oleh pelaku UMKM khususnya di Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kembali gairah perekonomian para pelaku UMKM tercapai atau tidak. Dimana setelah mendapatkan BPUM ini apakah para pelaku UMKM semakin produktif dengan memutarakan bantuan tersebut untuk mempertahankan usahanya atau justru habis terpakai untuk keperluan pribadi. Oleh karena itu, terlihat seberapa efektif program BPUM tersebut dalam mempertahankan eksistensi UMKM di Yogyakarta.

Oleh karena itu, dari latar belakang dan indikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimana efektivitas program bantuan produktif usaha mikro dalam meningkatkan eksistensi UMKM di Kota Yogyakarta selama masa pandemi Covid-19 yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul : “Efektivitas Program Bantuan Produktif Usaha Mikro dalam Meningkatkan Eksistensi UMKM Selama Pandemi Covid-19 di Kota Yogyakarta Tahun 2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas serta untuk mengetahui sejauhmana efektivitas bantuan produktif usaha mikro (BPUM) dalam mempertahankan roda perekonomian pelaku UMKM di Yogyakarta tahun 2021 sebagai upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menanggulangi permasalahan UMKM dari dampak pandemi Covid-19. Maka, masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Efektivitas Program Bantuan Usaha Mikro (BPUM) Dalam Meningkatkan Eksistensi UMKM Selama Pandemi Covid-19 di Kota Yogyakarta Tahun 2021?

2. Bagaimana Progres Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Yogyakarta sebelum dan sesudah memperoleh Bantuan Usaha Mikro (BPUM) ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program bantuan pemerintah dalam mempertahankan dan mendongkrak eksistensi UMKM selama Pandemi Covid-19 di Kota Yogyakarta Tahun 2021 serta, untuk mengetahui bagaimana progres Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebelum dan sesudah memperoleh bantuan Usaha Mikro (BPUM) agar nantinya dapat membantu meningkatkan gairah perekonomian pelaku UMKM selama pandemi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Hal penting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang dapat dirasakan serta diterapkan setelah adanya hasil penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan perkembangan ilmu pemerintahan, khususnya yang berhubungan dengan efektivitas program bantuan usaha mikro (BPUM) dalam membantu meningkatkan eksistensi UMKM selama pandemi Covid-19. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan penelitian berikutnya yang relevan.

2) Manfaat Praktis

- 1) Bagi masyarakat : dapat digunakan sebagai acuan dalam memperoleh Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dalam mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sehingga dapat membantu mempertahankan eksistensinya dan meningkatkan gairah perekonomian selama masa pandemi Covid-19.

- 2) Bagi pemerintah dan Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Yogyakarta : dapat dijadikan sebagai perencanaan, pengembangan serta evaluasi program selanjutnya untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
- 3) Bagi penulis : diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai program pemerintah dalam upaya mempertahankan sektor usaha mikro, kecil dan menengah melalui kelompok pelaku usaha mikro, kecil menengah yang ada di Yogyakarta.

E. Literatur Review

Dari beberapa penelitian terdahulu, pada dasarnya sama-sama meneliti tentang efektivitas program bantuan pemerintah selama pandemi covid-19. Dimana semua berfokus pada permasalahan efektivitas bantuan sosial serta pemberdayaan UMKM selama masa Pandemi Covid-19, akan tetapi sebelumnya, belum ada yang meneliti tentang “Efektivitas Program Bantuan Usaha Mikro (BPUM) Dalam Meningkatkan Eksistensi UMKM Selama Pandemi Covid-19 di Kota Yogyakarta Tahun 2021”, sehingga, penelitian ini dapat menjadi penelitian yang baru dilakukan yang datang dari pemikiran peneliti sendiri. dan bukan hasil dari pemikiran orang lain sebelumnya. Berikut merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan:

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul	Hasil Temuan
1.	Noni Noerkaisar (2020)	Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Mengatasi Dampak Covid-19 Di Indonesia	Bantuan sosial yang disalurkan pemerintah sampai dengan saat ini belum berjalan efektif. Masih terdapat permasalahan yang ditemui hampir diseluruh lini JPS baik dari hulu hingga ke hilir. Dari hulu, persoalan yang timbul terkait validitas data penerima bansos. Sedangkan dari hilir ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi, diantaranya ketidaktepatan sasaran dalam penerimaan bantuan, penyaluran bantuan yang tidak merata, proses distribusi yang memerlukan waktu lama untuk sampai kepada penerima manfaat, penyelewengan dana, pungutan liar serta adanya pengurangan jumlah nominal maupun sumber daya yang diterima, <i>inclusion</i> dan <i>exclusion error</i> disebabkan pendataan yang tidak diperbaharui, hingga politisasi.

2.	Fadhila nur fitria, Syakir ridho wijaya, Fairuz arta abhipray a (2021)	Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Dari Pemerintah Untuk Disalurkan Kepada Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Dikabupaten Ponorogo Tahun 2020	Dikabupaten ponorogo efektivitas terhadap bantuan sosial Tunai(BST) sudah cukup terrealisasikan dengan baik. Bisa disebut demikian karena bantuan (BST) yang disalurkan sebanyak 9 tahap itu telah diterima oleh masyarakat yang berhak menerima, akan tetapi pada 3 tahap terakhir bantuan sosial tunai tersalurkan sebanyak 3 kali dalam waktu yang bersamaan. Dan yang menjadi permasalahan dari penyaluran bantuan covid-19 ini adalah kurangnya bahkan tidak adaya sosialisasi dari pemerintah kabupaten ponorogo terhadap bantuan tersebut sehingga banyak dari masyarakat yang belum memahami secara pasti tentang bantuan yang diberikan selama masa pandemi tersebut. Pada aspek ketepatan sasaran masih banyak masyarakat yang tumpang tindih terhadap data yang menjadi acuan untuk pemberian bantuan tersebut, sehingga efektivitas
----	--	---	---

			dari ketepatan sasaran banyak menimbulkan prokontra.
3.	Melati, Zulkarna ini (2021)	Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Pasir Pengaraian	<p>Efektivitas pelaksanaan program BST dikelurahan pasir pengaraian kecamatan rambah kabupaten rokan hulu dapat disimpulkan belum efektif dilihat dalam indikator efektivitas yaitu:</p> <p>a. Pada aspek ketepatan sasaran, Ada keluarga penerima manfaat (KPM) yang kebanyakan tumpang tindih. Data awal yang menjadi acuan adalah data dari DTKS, yang dibuktikan. Hal ini membuktikan bahwa sasaran pemilihan di kelurahan pasir pengaraian tidak efektif.</p> <p>b. Pada aspek sosialisasi program, Beberapa aparat yang berperan dalam pelaksanaan program BST ini masih belum memahami juknis yang telah diberikan, begitupun masyarakat tidak paham kenapa BST ini diberikan dan untuk apa.</p>

			<p>c. Pada aspek tujuan program, Baik itu KPM maupun pelaksana, semua orang bekerja keras untuk memastikan bahwa tujuan program tercapai dan berjalan dengan baik. Namun, hanya penyelenggara pihak yang memiliki tujuan dari program BST ini, sedangkan KPM tidak peduli dan memiliki apa tujuan dari program BST tersebut.</p> <p>d. Pada aspek pemantauan program, hanya pihak kelurahan yang ikut campur sedangkan dari pihak dinas sosial sendiri tidak ikut andil dalam melakukan pemantauan program BST.</p>
4.	Fatkhul Khoiriya, Liana Oktavia, Ni' matus Zakiyah, dan Muham	Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di	Desa Gedongarum menjadi salah satu desa di Indonesia yang mendapat berbagai bentuk bantuan sosial selama pandemi Covid-19. Beberapa bantuan tersebut berupa tunai yang disebut dengan BST dan BLT-Dana Desa. Adapun jumlah dari penerima kedua bantuan tersebut adalah 26 KK untuk BLT-Dana Desa dan 97 untuk BST.

	mad Afthon Ilman Huda (2020)	Desa Gedongaru m Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	Dalam hal ini titik poin yang menjadi permasalahan dalam program BST dan BLT-Dana Desa di Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro masih dirasa kurang efektif dalam hal kurangnya keakuratan data dan tidak tepat sasaran sebab tidak ada pembaharuan data. Oleh karena itu, perlunya suatu inisatif tersediri dari perangkat desa agar program bantuan sosial BST dan BLT-Dana Desa ini bisa lebih baik kedepannya.
5.	Lia Fitriani, Muhamad Ali, Lalu Hendra Maniza, (2021)	Efektivitas Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dimasa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 Pada Dinas	Efektivitas strategi pemberdayaan UMKM Dinas Kerjasama UKM Provinsi NTB pada saat pandemi Covid-19 belum dapat dikatakan baik diantara ketiga indikator yang dijelaskan. Hanya dua indikator yang baik, yaitu indikator sasaran dan indikator sosialisasi terencana. 1. Strategi pemberdayaan UMKM dimasa Pandemi Covid-19 pada Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB ini sudah tepat sasaran, hal ini dilihat dari sudah cukup banyaknya

		Koperasi Dan UKM Povinsi NTB	<p>UKM yang menerima bantuan dan tersentuh disetiap kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat.</p> <p>2. Pemahaman program kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB berhasil dengan baik, karena proses sosialisasi program pemberdayaan diketahui sejumlah UKM yang yang membutuhkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tersebut.</p> <p>3. Tujuan program pemberdayaan ini tidak dapat dikatakan tercapai pada angka seratus persen karena disebabkan kekurangan dan kendala dalam pelaksanaannya</p>
6.	Rohana Tiara, Mardiant o	Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Palembang	<p>Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Palembang belum efektif. Dikatakan belum efektif karena telah membandingkan antara hasil wawancara dengan hasil kuesioner yang sudah berjalan dengan baik, namun masih masih ditemukan beberapa masalah dan hambatan.</p>

			<p>Hambatan yang muncul selama pelaksanaan program ini menurut hasil penelitian disebabkan oleh kurangnya anggaran untuk pelaksanaan program yang ada di Dinas Sosial Kota Palembang dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menjalankan serta mengawasi jalannya Program BPNT. Dalam pelaksanaan BPNT masih banyak aspek yang belum berjalan sebagaimana mestinya, seperti proses pendampingan yang masih dirasa kurang oleh KPM, kartu kombo error yang berakibat hilangnya saldo KPM, jumlah e-warong BPNT yang tidak banyak serta belum merata ke seluruh kelurahan, serta tidak memenuhi tahapan kegiatan pendampingan yang telah diatur di dalam program. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Palembang belum efektif.</p>
--	--	--	---

7.	Agung Aldino Putra	Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pada Masyarakat Di Kota Palu	Pelaksanaan program bantuan Sosial Kube pada masyarakat di Kota Palu belum berjalan secara Efektif dan maksimal, karena ada beberapa aspek yang tidak berjalan secara Efektif yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab dan wewenang Dinas Sosial Kota Palu sebagai pelaksana program. Hal ini ditunjukkan dari beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Palu selaku pelaksana dan penanggung jawab pada program bantuan tersebut dalam mengawal pelaksanaan program ini yaitu waktu pelaksanaan dan sasaran.
8.	Mutiara Shofi	Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai Kementrian Sosial RI Di Masa Pandemi Covid-19	Efektivitas pelaksanaan program BST di RW.001 Kelurahan Duri Kosambi belum efektif dilihat dalam setiap indikator efektivitas yaitu: Ketepatan Sasaran Program, dimana dalam pemilihan sasaran penerima program Bantuan Sosial Tunai (BST), karena terdapat keluarga penerima manfaat (KPM) yang masih tumpang tindih. Selanjutnya pada aspek Sosialisasi

		<p>(Studi Kasus Rw.001 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat).</p>	<p>program, tidak terdapat sosialisasi baik secara terbuka maupun tertutup dan tidak ada aparat yang berperan dalam pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk memberikan sosialisasi terkait program Bantuan Sosial Tunai, karena dapat memicu kerumunan di tengah pandemi Covid-19, sehingga masyarakat kurang memahami dalam menerima bantuan tunai sosial (BST). pada aspek tujuan program baik pihak pelaksana maupun keluarga penerima manfaat (KPM) RW.001 telah berusaha untuk mewujudkan tujuan program agar berjalan efektif. Namun pada kenyataannya hanya pihak pelaksana yang mengetahui tujuan dari program Program Bantuan Sosial Tunai (BST) ini sedangkan keluarga penerima manfaat (KPM) kurang mengetahui apa tujuan dari program BST tersebut. pada aspek pemantaun program tidak adanya pihak dari kelurahan dan RW yang ikut andil dalam melakukan</p>
--	--	--	--

			<p>pemantauan program Program Bantuan Sosial Tunai (BST). Dengan hal ini dikatakan pemantau program BST kurang efektif dalam pelaksanaannya karena dengan terlibatnya pihak kelurahan atau RW dalam memonitoring pelaksanaan penerimaan Bantuan Sosial Tunai dapat mengetahui masyarakat RW.001 yang belum terdata tetapi masuk kedalam kriteria calon penerima program Bantuan Sosial Tunai (BST). Pada pemantauan program sudah dikatakan efektif dikarenakan masyarakat dapat menikmati secara langsung bantuan BST tersebut tanpa ada potongan apapun.</p>
9.	Zainur Rahman, Normajatun, Sitna Hajar Malawat	Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Bagi Masyarakat (Studi Di	<p>Pelaksanaan program bantuan sosial tunai (BST) bagi masyarakat penerima bantuan di Kelurahan Pelambuan sudah terlaksana dengan baik dan cukup efektif. Hal tersebut diketahui dari indikator-indikator yang digunakan pada penelitian yang</p>

		<p>Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin)</p>	<p>dilakukan seperti pemahaman program yang berjalan dengan baik karena adanya pemahaman dan pengetahuan yang baik dari pihak yang terlibat seperti Lurah dan Ketua RT mengenai program bantuan sosial tunai (BST) mendukung berjalannya program bantuan ini, selain itu proses sosialisasi yang dilakukan secara <i>door-to door</i> oleh salah satu Ketua RT di Kelurahan Pelambuan turut membantu masyarakat penerima bantuan untuk mengetahui dan menerima informasi mengenai program bantuan sosial tunai ini, emudian tujuan dari pelaksanaan program bantuan ini juga dianggap telah berjalan dengan baik karena bantuan ini memang ditunjukkan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam rangka membantu memenuhi keperluan hidup dimasa pandemi covid-19, serta perubahan nyata yang dirasakan masyarakat penerima bantuan yang merasa sudah sangat terbantu dengan adanya program</p>
--	--	--	--

			<p>bantuan sosial tunai ini khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok, kemudian adanya harapan yang besar dari masyarakat penerima bantuan akan kelanjutan dari program bantuan sosial tunai ini mengingat situasi pandemi di negara ini belum berakhir sehingga kebutuhan akan bantuan sosial masih dirasa perlu. kemudian pada indikator tepat waktu menunjukkan bahwa pelaksanaan program bantuan ini sebenarnya sudah sesuai dengan jadwal yang diinformasikan namun pernah terjadi kasus penundaan penyaluran bantuan sehingga adanya kasus ini sedikit mengurangi efektivitas pelaksanaan program bantuan ini.</p>
10.	Nindya Cahya Rosadi	Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi	<p>Pelaksanaan program bantuan tunai sosial (BST) bahwa dari aspek kurun waktu, pemberian bantuan sosial ini sudah membantu masyarakat untuk menjaga daya belinya, namun memang dari segi nominal tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat</p>

		<p>Covid-19 Di Perumahan Taman Cikande, Jayanti, Tangerang</p>	<p>selama satu bulan penuh, lalu dari aspek sasaran, pemberian Bantuan Sosial Tunai di Perumahan Taman Cikande tepatnya di RT 02 RW 03 sudah tepat sasaran, dimana bantuan ini diberikan kepada mereka yang telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial yakni untuk mereka yang kehilangan mata pencaharian selama masa pandemic serta bagi mereka yang rentan terdampak pandemic ini. Pada aspek integrasi dapat disimpulkan bahwa pihak RT dan RW sudah melakukan proses integrasi atau sosialisasi. Dimana pihak RT dan RW melakukan sosialisasi secara pribadi dan melalui media social yakni WhatsApp Group RT. Bentuk sosialisai yang diberikan adalah informasi mengenai tujuan bantuan sosial, kriteri penerima atau sasarannya serta alur dan syarat administrasi dalam pencairan</p>
--	--	--	---

			<p>dana bantuan sosial tunai ini. selain itu, pemberian bantuan sosial di lingkungan ini juga selalu tepat nominalnya, dalam arti tidak ada pemangkasan secara sepihak dari pihak-pihak terkait. Pada aspek adaptasi dapat disimpulkan bahwa bentuk adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat mengenai pelaksanaan program bantuan sosial tunai ini adalah, masyarakat harus bisa menyisihkan waktu satu hari selama sebulan untuk mengambil dana bantuan, serta masyarakat harus terbiasa untuk menerapkan protocol kesehatan yang telah dianjurkan. Bantuan sosial tunai ini juga tidak membuat masyarakat menjadi pasif atau hanya mengharap dan mengandalkan uang bantuan, namun masyarakat tetap harus berusaha dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.</p>
--	--	--	---

Berdasarkan penelitian diatas, karena penelitian-penelitian terdahulu yang dipaparkan diatas berfokus pada aspek efektivitas program bantuan sosial dan pemberdayaan UMKM selama pandemi Covid-19 oleh pemerintah, penelitian ini menarik dan berbeda dengan penelitian lain. Oleh karenanya, belum terdapat penelitian terkait efektivitas bantuan produktif usaha mikro (BPUM) dalam meningkatkan eksistensi UMKM selama Pandemi Covid-19 di Kota Yogyakarta. Hal ini mengindikasikan bahwa penelitian ini akan meningkatkan jumlah ilmu pengetahuan tentang program bantuan pemerintah dimasa Covid-19 di Kota Yogyakarta.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kajian teoritis dan konseptual yang dikutipkan oleh pendapat para ahli yang terkait atau berhubungan dengan masalah yang akan di teliti. Ada beberapa konsep teori yang dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian ini, seperti :

a. Pengertian Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang berarti ada efeknya (akibat, pengaruh, kesannya) dapat membawa hasil atau berhasil guna. Dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia, efektivitas adalah menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Hasil yang mendekati sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sesungguhnya dicapai.

Menurut Baego Ishak, Efektivitas adalah sebuah kegiatan yang dilakukan secara sistematis, bertahap, cermat, dan secara maksimal untuk mencapai tujuan. Di sisi lain, pengertian efektivitas menurut Supriyono dalam (Anisah & Soesilowati, 2018) merupakan hubungan antara keluaran dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi dari pada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai

pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut. Maksudnya efektivitas itu menggambarkan seluruh siklus input, proses, dan output yang mengacu pada hasil guna dari pada suatu organisasi, program, atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) sudah dicapai, dan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi yang mencapai tujuannya dan target-targetnya. Maka, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.

b. Pengukuran Efektivitas

Menurut Subagyo dalam (Aprillita, 2019) ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas yaitu sebagai berikut :

a. Ketepatan sasaran program

Ketepatan sasaran program adalah sejauh mana peserta program yang tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan.

b. Sosialisasi program

Sosialisasi program adalah kemampuan pelaksana program dalam menyampaikan informasi pelaksanaan program agar dapat sampai kepada sasaran program tersebut yakni masyarakat pada umumnya.

c. Tujuan program

Tujuan Program adalah sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

d. Pemantauan program

Pemantauan Program merupakan bentuk perhatian kepada peserta program yang dilakukan setelah dilaksanakannya sebuah program.

Menurut Campbell J.P, dalam (Anisah & Soesilowati, 2018) Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:

1. keberhasilan program,
2. keberhasilan sasaran,
3. kepuasan terhadap program,
4. tingkat input dan output dan
5. pencapaian tujuan menyeluruh.

Dari beberapa pengukuran efektivitas diatas, diketahui bahwa efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Selanjutnya, berdasarkan pada beberapa pengukuran efektivitas diatas, maka untuk mengukur sejauhmana efektivitas sebuah program, peneliti menggunakan indikator-indikator menurut Subagyo, karena peneliti ingin memahami ukuran efektivitas program bantuan produktif usaha mikro (BPUM) melalui ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program.

c. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan sebuah proses penerapan melalui gagasan, konsep, inovasi yang dilakukan melalui tindakan yang dapat memberi perubahan dengan adanya keterampilan, pembelajaran serta pengetahuan (Farih, 2021). Implementasi kebijakan digunakan untuk mencapai sebuah maksud tertentu dirumuskan melalui kebijakan dan dilakukan oleh pihak berwajib seperti pemerintah (Tri et al., 2019). Proses implementasi baru bisa dijalankan apabila sasaran dan tujuan sudah

ditetapkan dengan program dan perkiraan dana yang sudah disiapkan telah disalurkan untuk mencapai sasaran (Tuwu et al., 2021).

Esensi implementasi kebijakan yaitu untuk mengetahui dan mengerti efek yang di timbulkan setelah adanya perumusan rancangan terkait program dan rencana kebijakan (Prabanawati, 2021). Disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang dinamis dimana pelaksana kebijakan merupakan aktor yang merealisasikan kebijakan menjadi kegiatan atau program sehingga akan didapat hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dalam kebijakan itu sendiri. Menurut Hasanah (2021) keberhasilan implementasi dilihat berdasarkan dua variable yaitu konteks dan isi. Berdasarkan isi menurut Hasanah (2021) implementasi kebijakan terdiri dari; 1) kebijakan sudah tepat atau belum jika dilakukan; 2) adanya kebijakan dapat menjadi output yang diharapkan sehingga timbul perubahan; 3) dalam sebuah kebijakan perlu adanya implementator kebijakan. Selanjutnya implementasi berdasarkan konteks yaitu; 1) tingkat kepatuhan masyarakat atau implementator; 2) keterlibatan para implementator dalam sebuah kebijakan; 3) karakter organisasi atau instansi.

d. Pengertian Program

Kata program berasal dari bahasa Inggris "*programe*" yang artinya acara atau rencana. Secara konseptual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, program diartikan sebagai kumpulan rencana dan kegiatan yang akan dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang.

Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana. Dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan. Sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan. Untuk lebih

memahami mengenai pengertian program, berikut ini akan dikemukakan definisi oleh beberapa ahli:

Menurut Charles O. Jones, pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu (Ramadani, 2019):

1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.
2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program biasanya juga diidentifikasi melalui anggaran.
3. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Di dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa di dalam setiap program dijelaskan mengenai (Putri et al., 2017) :

1. Tujuan kegiatan yang akan dicapai.
2. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan.
3. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
4. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
5. Strategi pelaksanaan.

Suatu program yang baik menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1984:181) dalam harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Pratama & Fauzi, 2018):

1. Tujuan yang dirumuskan secara jelas
2. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut

3. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin
4. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut.
5. Hubungan dalam kegiatan lain usaha pembangunan dan program pembangunan lainnya.
6. Berbagai upaya dalam bidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan, dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut.

Dengan demikian, ketika menyusun sebuah program, harus ditulis secara jelas dan ringkas untuk memenuhi kebutuhan audiens sasaran untuk mencapai tujuan melalui partisipasi warga. Dengan beberapa hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa program adalah kumpulan tugas atau kegiatan yang harus diselesaikan dalam rangka memenuhi target rencana yang telah ditetapkan. Di dalamnya disebutkan bahwa program-program merupakan penjabaran dari langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Program pemerintah adalah upaya untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan pemaparan diatas, salah satu cara untuk mengukur sebuah efektivitas program dapat dilakukan dengan memberikan penilaian atau pengukuran terhadap tingkat sejauhmana kesesuaian kegiatan program terlaksana serta membandingkan antara tujuan program dengan *output* dari program itu sendiri untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan telah mencapai tujuan dari program tersebut.

G. Definisi Konseptual

Definisi konseptual yaitu merupakan sebuah definisi berupa konsep serta makna yang masih sangat abstrak walaupun secara intuitif masih bisa dipahami maksudnya.

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Menurut Hani Handoko (2000), efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sesungguhnya dicapai. dalam (Samarinda, 2018)

2. Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Maka, implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan.

3. Pengertian Program

Kunarjo menjelaskan bahwa program didefinisikan sebagai perangkat dari kegiatan-kegiatan atau paket dari kegiatan yang diordinasikan untuk tujuan penciptaan sasaran khusus, seperti program imunisasi anak-anak, program air bersih dan lainnya.

Menurut Jones (1984) menyatakan bahwa program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Terdapat Hal tersebut menggambarkan bahwa program-program merupakan suatu penjabaran atas langkah-langkah dalam mencapai tujuan tersebut. dalam hal ini, program pemerintah berarti upaya untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan.

H. Definisi Operasional

Dalam pelaksanaan sebuah program terdapat beberapa indikator-indikator yang akan dipelajari dan dianalisa untuk mengukur tingkat efektivitas suatu program dengan melihat sejauhmana ketercapaian sasaran dari penyaluran program bantuan produktif usaha mikro (BPUM) tersebut. Beberapa indikator dalam mengukur efektivitas menurut Subagyo sebagai berikut :

Tabel 1.1

Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Parameter
----------	-----------	-----------

Efektivitas Program	Ketepatan sasaran program	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Usulan UMKM berhak memperoleh BPUM - Jumlah UMKM yang terverifikasi menerima bantuan UMKM
	Sosialisasi program	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi yang disampaikan - Faktor pendukung penyampaian informasi
	Tujuan program	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami tujuan program BPUM - Penggunaan dana BPUM
	Pemantauan program	<ul style="list-style-type: none"> - Respon pelaku UMKM terhadap program BPUM - Kepuasan terhadap Program BPUM
Implementasi Program	Isi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaruh atau progres BPUM terhadap pemulihan eksistensi UMKM
	Konteks	<ul style="list-style-type: none"> - Keterlibatan pemerintah terhadap kondisi UMKM - Aktivitas masyarakat terhadap BPUM

Sumber : Data Diolah (2021)

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang sistematis guna menyusun ilmu pengetahuan (Suryana, 2010). Pada dasarnya penelitian digunakan untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan menemukan jawabannya diperlukan suatu metode

penelitian yang memadai. Metode penelitian juga turut akan menentukan tahapan-tahapan dalam penelitian.

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dipilih karena ingin memecahkan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian yakni Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta serta pelaku UMKM di Kota Yogyakarta saat ini berdasarkan fakta-fakta yang ada dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang diperoleh dari observasi, wawancara serta dokumen. Melalui penelitian deskriptif kualitatif, peneliti bermaksud untuk menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, serta data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang berkaitan dengan efektivitas program bantuan produktif usaha mikro (BPUM) dalam meningkatkan eksistensi usaha mikro kecil menengah (UMKM) selama masa pandemi Covid-19 di Kota Yogyakarta tahun 2021. Menurut Kirk dan Miller dalam (Solihin, Endang. 2021) metodologi kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada suatu kasus tertentu.

b. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan di Dinas Perindustrian, Koperasi UKM Kota Yogyakarta, Walikota Yogyakarta, Jl. Kenari No.56, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta para pelaku UMKM yang ada di Kota Yogyakarta.

c. Unit Analisa

Peneliti menentukan subjek penelitian dengan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2017) *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel data yang didasarkan pada pertimbangan tertentu (Lauwis, Edwin dan Setyawati, 2018). Adapun unit analisa data yang telah ditentukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3

Unit Analisa Data

No.	Instansi	Jumlah	Narasumber
1.	Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta	1	Kepala Bidang UKM
2.	Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta	1	Kasi Bidang Pengelola Data, Informasi dan Penguatan Manajemen UKM
3.	Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta	1	Kasi Kemitraan dan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil

4.	Pelaku UMKM di Kota Yogyakarta	5	Pelaku UMKM Yang memperoleh Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)
5.	Pelaku UMKM di Kota Yogyakarta	3	Pelaku UMKM yang tidak memperoleh Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)
	Jumlah	11	

Sumber : Data Diolah (2021)

d. Jenis Data

Dalam penelitian ini data dibagi menjadi dua kelompok diantaranya data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui wawancara mendalam (*In depth Interview*) dengan para informan yang mengetahui permasalahan pada fokus penelitian.

Tabel 1.4

Data Primer

No.	Data Primer	Sumber Data	Teknik Pengumpul an Data

1.	Ketepatan sasaran program	Kep. Bidang UKM	Wawancara
2.	Proses Sosialisasi Program BPUM	Kasi Bidang Pengelola Data, Informasi dan Penguatan Manajemen UKM	Wawancara
3.	Ketersesuaian antara tujuan program dengan pelaksanaan program	UMKM yang memperoleh dan tidak memperoleh BPUM	Wawancara
4.	Monitoring dan evaluasi setelah pelaksanaan program	Kasi Kemitraan dan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil	Wawancara

Sumber : Data Diolah (2021)

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi-informasi yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan atau dari data yang dikumpulkan dari tangan kedua. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui internet maupun secara langsung, jurnal, buku-buku dan arsip-arsip yang berhubungan dengan penelitian.

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dimana diharapkan mampu memberikan data yang akurat dan lebih spesifik, adapun teknik yang digunakan adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*), untuk melihat efektivitas bantuan produktif usaha mikro (BPUM) dalam membantu mempertahankan UMKM dimana hal ini berkaitan dengan masalah pendapatan masyarakat.

a) Studi Pustaka

Studi pustaka dimaksudkan untuk memberikan pemahaman awal bagi peneliti, terutama hal-hal yang berkenaan dengan hasil-hasil penelitian terdahulu untuk menghindari kekeliruan pemahaman. Studi pustaka juga digunakan untuk mengumpulkan bahan bacaan sebagai literature seperti buku, internet, makalah dan hasil-hasil penelitian lain yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti.

b) Pengamatan (Observasi)

Dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipasi (pengamatan langsung), yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang akan diteliti secara langsung, guna memperoleh gambaran menyeluruh tentang objek penelitian.

c) Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*), yaitu teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam (*Indepth Interview*) atau melakukan tanya jawab dengan para informan yang mengetahui permasalahan

yang diangkat dalam penelitian ini, sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul di kemudian hari dapat terselesaikan.

d) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai dokumentasi atau catatan yang ada serta mencatat dan merekam keadaan yang akan diteliti dalam unit Analisa. Data yang dimaksud berupa catatan, rekaman, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan arsip pemerintah.

f. Teknik Analisi Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. Menurut Bogdan dan Biken dalam (Moleong, 2010) bahwasanya analisis data sebagai upaya untuk menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi secara lengkap dan dapat dipahami. Adapun teknis analisis data dalam penelitian kualitatif ini sebagai berikut :

a) Reduksi Data

Reduksi data yaitu merangkum atau memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting sesuai dengan tema dan polanya. Atau dengan kata lain proses yang dilakukan untuk menyederhanakan dan pemilihan data-data kasar atau temuan yang diperoleh dilapangan.

b) Penyajian Data

Penyajian data akan dilakukan dalam bentuk penguraian singkat, bagan, kategori-kategori yang berhubungan, flowchart, dan

sejenisnya. Penyajian data ini mendeskripsikan seluruh informasi yang telah terkumpul pada dasarnya. Penyajian data biasanya dalam bentuk teks naratif pada penelitian kualitatif.

c) Penarikan Kesimpulan

Pada langkah ini, yakni mengemukakan temuan baru yang belum pernah ada atau menarik kesimpulan dari pembahasan yang sudah ada dengan cara memilih data yang dapat menjawab permasalahan yang sudah ada agar didapatkan kesimpulan yang valid.